

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketidakterpenuhan *bonum coniugum* (kesejahteraan suami-istri) akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai dasar yuridis permohonan deklarasi nullitas perkawinan dalam Gereja Katolik. Fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana KDRT, baik itu fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, dapat menjadi bukti kegagalan mewujudkan tujuan personal perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teologis-yuridis melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bonum coniugum* merupakan tujuan hakiki perkawinan yang mencakup kesejahteraan integral pasangan dalam dimensi fisik, psikis, dan rohani. KDRT secara fundamental meniadakan dinamika kasih dan saling memberi diri yang menjadi inti dari *consortium totius vitae*. Dalam perspektif hukum kanonik, KDRT yang terjadi secara sistematis dapat menjadi indikasi adanya cacat konsensus (*defectus consensus*), baik berupa simulasi parsial (*simulatio partialis*) terhadap *bonum coniugum* maupun ketidakmampuan psikis untuk memikul kewajiban esensial perkawinan sesuai Kanon 1095.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa deklarasi nullitas dalam kasus KDRT bukanlah sebuah perceraian, melainkan pernyataan yuridis bahwa sejak awal ikatan sakramental yang sah tidak pernah terbentuk karena adanya kecacatan mendasar. Secara pastoral, Gereja harus memprioritaskan perlindungan terhadap martabat korban dan keselamatan jiwa (*salus animarum*) sebagai hukum tertinggi, serta tidak menyalahartikan "bahasa iman" untuk membenarkan situasi ketidakadilan.

Kata kunci: *Bonum Coniugum*, KDRT, Deklarasi Nullitas Perkawinan, Hukum Kanonik, Sakramen Perkawinan.

ABSTRACT

This research analyzes the unfulfillment of *bonum coniugum* (the well-being of the spouses) due to Domestic Violence (DV) as a juridical basis for the declaration of nullity of marriage in the Catholic Church. The primary focus is to examine how DV, whether physical, psychological, sexual, and economic, serves as evidence of the failure to achieve the personal ends of marriage as regulated in the 1983 Code of Canon Law. The methodology used is qualitative with a theological-juridical approach through library research.

The findings indicate that *bonum coniugum* is an essential end of marriage encompassing the integral well-being of the spouses in physical, psychic, and spiritual dimensions. DV fundamentally negates the dynamics of love and mutual self-giving at the heart of the *consortium totius vitae*. From a canonical perspective, systematic DV can indicate a defect of consensus (*defectus consensus*), appearing as partial simulation (*simulatio partialis*) against *bonum coniugum* or a psychological incapacity to assume the essential obligations of marriage under Canon 1095.

The study concludes that a declaration of nullity in cases of DV is not a divorce but a judicial pronouncement that a valid sacramental bond never existed from the beginning due to fundamental flaws. Pastorally, the Church must prioritize the protection of the victim's dignity and the salvation of souls (*salus animarum*) as the supreme law, while ensuring that "faith language" is not misinterpreted to justify injustice.

Keywords: *Bonum Coniugum*, Domestic Violence, Declaration of Nullity of Marriage, Canon Law, Sacrament of Marriage.